

Endah Trihayuningtyas, Wisnu Rahtomo dan Haryadi Darmawan : Rencana Tata Kelola Destinasi Pariwisata Kawasan Pulau Camba-Cambang dan Sekitarnya di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

RENCANA TATA KELOLA DESTINASI PARIWISATA KAWASAN PULAU CAMBA-CAMBANG DAN SEKITARNYA DI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Endah Trihayuningtyas⁽¹⁾, Wisnu Rahtomo⁽²⁾, Haryadi Darmawan⁽³⁾

Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung

Korespondensi Penulis: tyas_ent@yahoo.com

ABSTRAK

Pembangunan pariwisata bahari pada hakikatnya adalah upaya mengembangkan dan memanfaatkan objek serta daya tarik wisata bahari di kawasan pesisir dan laut Indonesia. Dengan demikian, agar pengembangan pariwisata, termasuk wisata bahari dapat memberikan manfaat ekonomi yang maksimal bagi masyarakat, sektor swasta, dan pemerintah daerah, serta juga mampu memberi pengalaman yang bernilai bagi wisatawan, menjamin kelestarian lingkungan alam, kelestarian sosial budaya dan adat istiadat masyarakat, maka dalam pelaksanaannya dibutuhkan strategi yang terencana dan sistematis dalam pengelolaan di sebuah destinasi. Salah satu destinasi pariwisata yang memiliki tujuan sebagai kawasan wisata bahari adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten ini memiliki keinginan untuk menjadikan pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan. Dalam dua dekade terakhir pada perspektif internasional menunjukkan bahwa pola pengelolaan kolaboratif dalam konteks pariwisata semakin mengemuka. Pola ini disebut pula Destination Management Organization (DMO). Pola tersebut dinilai cukup ampuh karena melibatkan langsung semua pihak yang terkait pemangku kebijakan dan kepentingan dalam proses pembangunan pariwisata. Untuk itulah kemudian, manajemen pengorganisasian terhadap sebuah destinasi pariwisata menjadi suatu keharusan, bukan sebagai bentuk implementasi dari perencanaan semata, melainkan suatu tata kelola yang berkelanjutan secara keseluruhan dengan keterlibatan berbagai pihak, khususnya masyarakat lokal. Konsep yang digunakan konsep tentang *stakeholder* yang terkait dengan pembangunan pariwisata, kemudian dikaitkan dengan konsep tingkat kepentingan, pengaruh, serta keterlibatan *stakeholder* serta konsep pengembangan model kelembagaan dan bentuk tata kelola yang mampu meningkatkan partisipasi *stakeholder*. Permasalahan yang terjadi adalah banyaknya sumberdaya alam yang dapat dimanfaatkan dalam bidang pariwisata, sumberdaya manusia yang jumlahnya dapat dimanfaatkan sebagai tenaga kerja bidang pariwisata dan sumberdaya potensial lain yang belum dimanfaatkan secara optimal, maka dibutuhkan format tata kelola yang sesuai dengan kondisi tersebut agar semua sumberdaya potensial dapat dimanfaatkan secara optimal.

Kata kunci : Stakeholder, Sistem Koordinasi, Tata Kelola Destinasi, Tingkat Kepentingan dan Pengaruh

TOURISM DESTINATION MANAGEMENT PLAN OF CAMBA-CAMBANG ISLAND AREA AND SURROUNDING IN PANGKAJENE AND KEPULAUAN REGENCY

ABSTRACT

The development of marine tourism is essentially an effort to develop and utilize marine tourism object in coastal area and The Indonesian seas. Thus, for the development of tourism, including marine tourism can provide maximum economic benefits for the community, the private sector, and local governments, as well as providing experience for tourists, ensuring the sustainability

of the natural environment, socio-cultural preservation and customs of society, it requires a well-planned strategy and management in the management of the destination. One of the tourism destinations that has marine destination is Pangkajene Region and South Sulawesi Province. This region has a vision to make tourism as one of the leading sectors. In the last two decades- from an international perspective it has been shown that the pattern of collaborative management in the context of tourism is increasingly prominent. This pattern is also called Destination Management Organization (DMO). The pattern is considered quite powerful because it involves all stakeholders related stakeholders and interests in the process of tourism development. For that reason, organizing management of a tourism destination becomes a necessity, not as a form of implementation of planning alone, but an overall sustainable governance with the involvement of various parties, especially local communities. The grand theory used in this research is stakeholder concepts related to tourism development, then linked with the concept of interest level, influence, and stakeholder involvement and the concept of institutional model development and form of governance that can increase stakeholder participation. The problems that occur are the number of natural resources that can be utilized in the field of tourism, human resources whose numbers can be utilized as a workforce in the field of tourism and other potential resources that have not been utilized optimally, it is necessary to form the right governance in accordance with these conditions so that all potential resources can be utilized optimally.

Key Words : Stakeholder, Coordination System, Destination Management Organization, Level of Interest and Influence

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu Negara Kepulauan terbesar yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia setelah Kanada, serta kehidupan laut yang kaya sumber daya alam tersebar di berbagai pulau kecil dan besar di seluruh penjuru nusantara (Numberi, 2009). Kondisi alam atau letak geografis dan karakteristik daerah yang otentik merupakan daya tarik bagi wisatawan nusantara maupun mancanegara. Salah satu pemanfaatan kondisi alam dan letak geografis Indonesia dapat melalui pembangunan wisata bahari. Pembangunan pariwisata bahari pada hakikatnya adalah upaya mengembangkan dan memanfaatkan objek serta daya tarik wisata bahari di kawasan pesisir dan laut Indonesia. Dengan demikian, agar pengembangan pariwisata, termasuk wisata bahari dapat memberikan manfaat ekonomi yang maksimal bagi masyarakat, sektor swasta, dan pemerintah daerah, serta juga mampu memberi pengalaman yang bernilai bagi wisatawan, menjamin kelestarian lingkungan alam, kelestarian sosial budaya dan adat istiadat masyarakat, maka dalam pelaksanaannya

dibutuhkan strategi yang terencana dan sistematis dalam pengelolaan di sebuah destinasi.

Salah satu destinasi pariwisata yang memiliki tujuan sebagai kawasan wisata bahari adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten ini memiliki keinginan untuk menjadikan pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan.

Merujuk pada RIPPDA Kabupaten Pengkajene dan Kepulauan 2014 – 2025, memiliki Visi sebagai berikut : “Kepariwisataan Kabupaten Pangkajene & Kepulauan yang berbasis kepada wisata Bahari dan Ekowisata yang berdaya saing dan berwawasan Global pada tahun 2025”, dan salah satu misi sebagai berikut :

“Pemanfaatan dan pengelolaan terhadap sumber daya kepariwisataan sehingga dapat berdaya saing dalam upaya meningkatkan kinerja ekonomi daerah serta peningkatan taraf hidup masyarakat”.

Demi mewujudkan visi di atas yang didukung oleh pencapaian misi tersebut, maka salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui pengelolaan yang lebih

Endah Trihayuningtyas, Wisnu Rahtomo dan Haryadi Darmawan : Rencana Tata Kelola Destinasi Pariwisata Kawasan Pulau Camba-Cambang dan Sekitarnya di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

terstruktur dan terkoordinasi. Didalam Abdurrahman (2014), dalam dua dekade terakhir pada perspektif internasional menunjukkan bahwa pola pengelolaan kolaboratif dalam konteks pariwisata semakin mengemuka. Pola ini disebut pula Destination Management Organization (DMO). Pola tersebut dinilai cukup ampuh karena melibatkan langsung semua pihak yang terkait pemangku kebijakan dan kepentingan dalam proses pembangunan pariwisata.

DMO adalah tata kelola destinasi pariwisata yang terstruktur dan sinergis yang mencakup fungsi koordinasi, perencanaan, implementasi dan pengendalian organisasi destinasi secara inovatif dan sistemik melalui pemanfaatan jejaring, informasi dan teknologi yang terpadu dengan peran masyarakat, pelaku/asosiasi, industri, akademisi dan pemerintah yang memiliki tujuan, proses dan kepentingan bersama. (Pedoman Pembentukan dan Pengembangan DMO, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2010)

Selain itu UNWTO (2008) mengemukakan, DMO memiliki fungsi untuk memimpin dan mengkoordinasikan elemen destinasi (atraksi, amenitas, aksesibilitas, SDM, citra/image, harga), marketing, maupun lingkungan yang berkelanjutan (sustainable). Dalam hal ini, DMO menjadi sebuah perspektif yang hendak memberikan ruang partisipasi bagi semua pihak untuk terlibat dalam mengelola sebuah destinasi pariwisata. DMO tidak hanya berperan guna pengembangan produk, marketing dan promosi, serta perencanaan dan penelitian saja, melainkan memainkan peran sebagai pembentukan tim dan kemitraan, jalinan masyarakat (community relation), serta koordinasi dan kepemimpinan. (Destination Consultancy Group, 2010).

Dalam era otonomi, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan diharapkan dapat dikelola secara lebih produktif untuk meningkatkan perekonomian wilayah yang lebih besar. Dengan demikian dibutuhkan

pengelolaan yang lebih profesional untuk mendapatkan nilai lebih dari pembangunan pariwisata yang dilakukan. Dalam rangka memadupadankan berbagai potensi yang ada di kawasan destinasi tersebut, maka dibutuhkan tata kelola yang tepat.

Untuk itulah kemudian, manajemen pengorganisasian terhadap sebuah destinasi pariwisata menjadi suatu keharusan, bukan sebagai bentuk implementasi dari perencanaan semata, melainkan suatu tata kelola yang berkelanjutan secara keseluruhan dengan keterlibatan berbagai pihak, khususnya masyarakat lokal.

Berdasarkan banyaknya sumberdaya alam yang dapat dimanfaatkan dalam bidang pariwisata, sumberdaya manusia yang jumlahnya dapat dimanfaatkan sebagai tenaga kerja bidang pariwisata dan sumberdaya potensial lain yang belum dimanfaatkan secara optimal, maka dibutuhkan format tata kelola yang sesuai dengan kondisi tersebut agar semua sumberdaya potensial dapat dimanfaatkan secara optimal. Sehingga tujuan yang ingin dicapai adalah dapat memetakan stakeholder, mengembangkan sistem koordinasi kelembagaan yang sesuai dengan kondisi daerah, mengetahui tingkat kepentingan, pengaruh, serta keterlibatan stakeholder dengan mengembangkan model kelembagaan dan bentuk tata kelola yang mampu meningkatkan partisipasi stakeholder.

Ramirez dalam Buckles, D, 1999 mengelompokkan stakeholder ke dalam stakeholder primer, sekunder dan stakeholder kunci. Sebagai gambaran, pengelompokan tersebut dapat dikemukakan kelompok stakeholder sebagai berikut:

1. Stakeholder Kunci : Stakeholder kunci merupakan stakeholder yang memiliki kewenangan secara legal dalam hal pengambilan keputusan
2. Stakeholder Primer : Stakeholder primer merupakan stakeholder yang memiliki kaitan kepentingan secara langsung dengan suatu kebijakan, program dan proyek. Mereka harus ditempatkan

sebagai penentu utama dalam proses pengambilan keputusan

3. Stakeholder Sekunder : Stakeholder sekunder adalah stakeholder yang tidak memiliki kaitan kepentingan secara langsung dengan suatu kebijakan, program dan proyek pemerintah (publik), tetapi memiliki kepedulian dan keprihatinan sehingga mereka turut bersuara dan berpengaruh terhadap keputusan legal pemerintah

Lokasi pada penelitian difokuskan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan wilayah C2 yaitu Pulau Camba – Cambang, Pulau Sabutung, Pulau Satando, Pulau Saugi, dan Pulau Kulambang.



Gambar 1

Peta Wilayah C2

Sumber: RIPPDA Kabupaten Pangkajene Kepulauan 2014 – 2015

Menurut Beritelli et al., (2007) tata kelola adalah konsep yang mengacu pada hubungan antara berbagai stakeholders dan bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain. Hal itu terkait bagaimana para stakeholders menentukan, melaksanakan dan mengevaluasi aturan untuk interaksi para stakeholders, interaksi tersebut dapat pula disebut kolaborasi karena di dalamnya terdapat unsur kerja sama multi stakeholder atau multi organisasi. Tata kelola ini juga akan berimplikasi kepada produk wisata, dimana memerlukan aktifitas wisata terpadu (Wirakusuma, 2017).

Agranoff dan McGuire (2003) dalam Abdurahman (2014) mendefinisikan collaborative governance sebagai proses fasilitasi dan pengoperasian dalam bentuk multi organisasi untuk menyelesaikan permasalahan yang tidak bisa terselesaikan atau sulit diselesaikan oleh satu organisasi. Dapat disimpulkan bahwa collaborative governance merupakan kerja sama multi organisasi untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang di hadapi oleh destinasi, sehingga kolaborasi dapat terwujud baik saat terpenuhinya faktor kesetaraan maupun tidak (equal & inequal kolaboratif) diantara para subyek yang terlibat.

Teknik skoring pada konsep Rosalinda dimodifikasi oleh Abbas (2005), dimana dengan nilai ini hasilnya akan berupa matriks yang terdiri dari empat kuadran stakeholder.

1. Subjects memiliki kepentingan yang tinggi tetapi pengaruhnya rendah. Walaupun mendukung kegiatan, kapasitasnya terhadap dampak mungkin tidak ada.

2. Key players merupakan stakeholder yang aktif karena mempunyai kepentingan dan pengaruh yang tinggi terhadap pengembangan suatu proyek.

3. Crowd merupakan stakeholder yang memiliki sedikit kepentingan dan pengaruh terhadap hasil yang diinginkan dan hal ini menjadi pertimbangan untuk mengikutsertakannya dalam pengambilan keputusan.

4. Context setters memiliki pengaruh yang tinggi tapi sedikit kepentingan sehingga dapat menjadi risiko signifikan untuk dipantau. (Reed et al. 2009).

Peran DMO menurut Destination Consultancy Group di dalam Morisson (2012 ; 5), memiliki 6 peran kepemimpinan dalam pariwisata dalam tujuan keseluruhan untuk pariwisata di masa depan.

1. Kepemimpinan dan Koordinasi: DMO memiliki peran kepemimpinan dalam kepariwisataan dalam sebuah destinasi, dalam fungsi ini DMO

berperan memberikan arahan terkait pariwisata di masa yang akan datang. Dan mereka terlibat dalam kepariwisataan di destinasi tersebut, jadi DMO bertindak sebagai koordinator dari segala upaya dari setiap komponen di destinasi tersebut.

2. Perencanaan dan Penelitian: DMO memiliki peran kunci dalam mempersiapkan kebijakan pariwisata, rencana dan strategi untuk suatu destinasi. Hal tersebut dilakukan untuk penelitian tentang target pasar yang ada dan potensi untuk panduan pemasaran semata-mata untuk menentukan pengembangan produk di masa depan. DMO dapat melacak program utama pesaingnya dan berusaha untuk terus belajar dari studi kasus untuk meningkatkan produk pengembangan dan pemasaran.

3. Pengembangan produk: DMO memiliki tanggung jawab keseluruhan untuk pengembangan berkelanjutan dalam hal produk wisata termasuk produk fisik, masyarakat, paket, dan program. Dibutuhkan inventarisasi untuk penawaran destinasi saat ini dan penawaran-penawaran itu membantu perbaikan kualitas produk. Selain itu, DMO mengidentifikasi produk wisata baru sebagai peluang pengembangan dan memberikan bantuan dalam mewujudkan proyek-proyek dan program.

4. Pemasaran dan promosi: DMO mengembangkan strategi pemasaran secara keseluruhan dan mempersiapkan jangka panjang serta rencana pemasaran jangka pendek untuk pariwisata. Hal tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi sasaran pasar prioritas dan memilih gambar yang paling efektif untuk mencapai tujuan pada pelaksanaan pendekatan merek yang efektif. DMO menggunakan metode pemasaran komunikasi, metode tersebut menggabungkan secara online dan promosi tradisional untuk menginformasikan dan membujuk wisatawan untuk datang ke tempat tujuan.

5. Kemitraan dan penguatan tim: DMO menempatkan bersama tim tujuan yang efektif dan membangun kemitraan untuk mencapai tujuan pengembangan

produk dan pemasaran destinasi. Beberapa dari kemitraan ditetapkan dalam tujuan, sementara yang lain dengan pihak eksternal termasuk agen perjalanan, operator tur, penyedia transportasi, perencana MICE, dan lain-lain.

6. Hubungan masyarakat: DMO bertindak sebagai peran utama dan pendukung pariwisata dalam tujuan dengan meningkatkan kesadaran dan profil pariwisata lokal untuk mendukung pencapaian tujuan pengembangan produk dan pemasaran. Selain itu, DMO mungkin berkonsultasi dengan warga masyarakat ketika membuat keputusan penting yang akan mempengaruhi mereka tentang gaya hidup dan standar hidup.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah metode deskriptif kualitatif. Pada hakikatnya penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek dengan tujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena yang diselidiki (Convelo G. Cevilla, dkk., Pengantar Metode Penelitian, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1993), 73). Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan apa saja yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi yang berlangsung.

Metode penelitian kualitatif merupakan metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini lebih menggunakan teknik analisis mendalam (in-depth analysis), yaitu mengkaji masalah secara kasus per kasus karena metodologi kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya. Tujuan dari metodologi ini bukan suatu generalisasi tetapi pemahaman secara

mendalam terhadap suatu masalah. Penelitian kualitatif berfungsi memberikan kategori substantif dan hipotesis penelitian kualitatif.

Untuk metode penelitian ini dibutuhkan populasi dan sampel untuk mengetahui menjadi sumber informasi mengenai kepentingan.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah beberapa stakeholder yang terkait kegiatan pariwisata di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Teknik analisis data yang digunakan pada metode kualitatif dalam penelitian ini meliputi:

Data Reduction

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti : merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

Reduksi data bisa dibantu dengan alat elektronik seperti : komputer , dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu. Dengan reduksi, maka peneliti merangkum, mengambil data yang penting, membuat kategorisasi, berdasarkan huruf besar, huruf kecil dan angka. Data yang tidak penting dibuang.

Data Display

Setelah data direduksi, maka langkah berikutnya adalah mendisplaykan data. Display data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk : uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sebagainya. Miles dan Huberman (1984) menyatakan “the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text”, artinya : yang paling sering digunakan untuk

menyajikan data dalam penelitian kualitatif dengan teks yang bersifat naratif. Selain dalam bentuk naratif, display data dapat juga berupa grafik, matriks, network (jejaring kerja).

Fenomena sosial bersifat kompleks, dan dinamis sehingga apa yang ditemukan saat memasuki lapangan dan setelah berlangsung agak lama di lapangan akan mengalami perkembangan data. Peneliti harus selalu menguji apa yang telah ditemukan pada saat memasuki lapangan yang masih bersifat hipotetik itu berkembang atau tidak. Bila setelah lama memasuki lapangan ternyata hipotesis yang dirumuskan selalu didukung data pada saat dikumpulkan di lapangan, maka hipotesis tersebut terbukti dan akan berkembang menjadi teori yang grounded. Teori grounded adalah teori yang ditemukan secara induktif, berdasarkan data-data yang ditemukan di lapangan, dan selanjutnya diuji melalui pengumpulan data yang terus menerus. Bila pola-pola yang ditemukan telah didukung oleh data selama penelitian, maka pola tersebut menjadi pola yang baku yang tidak lagi berubah. Pola tersebut selanjutnya didisplaykan pada laporan akhir penelitian.

Conclusions

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun bila kesimpulan memang telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (dapat dipercaya).

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru

yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Stakeholder Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Berdasarkan hasil temuan ada 24 Stakeholder yang terdiri dari unsur Pemerintah dan Non Pemerintah. Berdasarkan pada Buckles, D(1999) Stakeholder dikelompokkan kedalam 3 kelompok yaitu. Stakeholder Kunci, Stakeholder Primer, Stakeholder Sekunder. Berikut tabel penggolongan Stakeholder yang ada di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

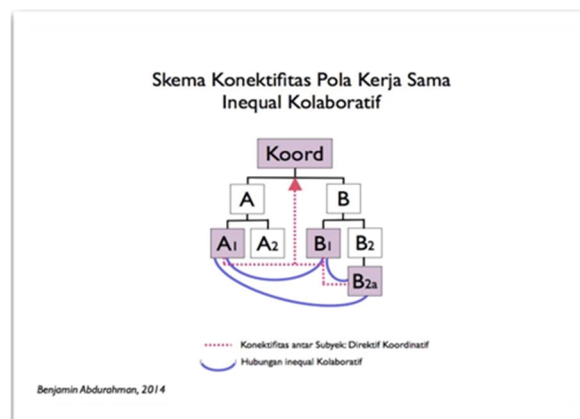
Tabel 1.
Pengelompokan Stakeholder

STAKE-HOLDER KUNCI	STAKE-HOLDER PRIMER	STAKE-HOLDER SEKUNDER
Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kebudayaan dan Pariwisata • Dinas Perhubungan • Dinas Kelautan dan Perikanan • Dinas Kesehatan • Dinas Tata ruang, Pemukiman, dan Kebersihan • Badan Penanggulangan Bencana Daerah • Dinas Kehutanan • Dinas Sosial dan Tenaga Kerja • Dinas Pertambangan • BKDD • Satpol PP • Polres • Dinas Pembangunan Umum • Dinas Koperasi dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) • Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) • Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) • Tokoh Masyarakat Pangkep • Kelompok nelayan • Kelompok pedagang • Komunitas pencinta alam • Komunitas fotografi • Komunitas jurnalis

STAKE-HOLDER KUNCI	STAKE-HOLDER PRIMER	STAKE-HOLDER SEKUNDER
	<ul style="list-style-type: none"> Perdagangan • Dinas Pendidikan • Dinas Pemuda dan Olahraga • Badan Lingkungan Hidup • BAPPEDA 	

Koordinasi antar Stakeholder

Agranoff dan McGuire (2003) dalam Abdurahman (2014) mendefinisikan collaborative governance sebagai proses fasilitasi dan pengoperasian dalam bentuk multi organisasi untuk menyelesaikan permasalahan yang tidak bisa terselesaikan atau sulit diselesaikan oleh satu organisasi. Dapat disimpulkan bahwa collaborative governance merupakan kerja sama multi organisasi untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang di hadapi oleh destinasi. Dalam kerja sama yang dilakukan terdapat dua karakteristik kerja sama yang berbeda yaitu pola kerja sama inequal collaborative (pola struktural) dan equal collaborative (pola jejaring) bentuk pola tersebut dapat di lihat pada gambar berikut ini:

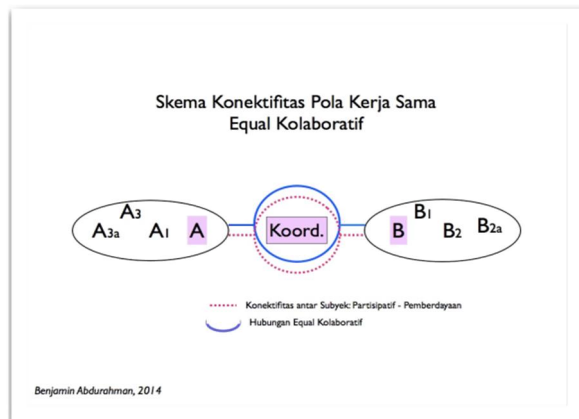


Gambar 2
Pola Inequal Kolaboratif

Pada skema di atas proses kerja sama yang terjadi terpusat pada arahan koordinator atau perintah direktif dari koordinator, sehingga pengambilan

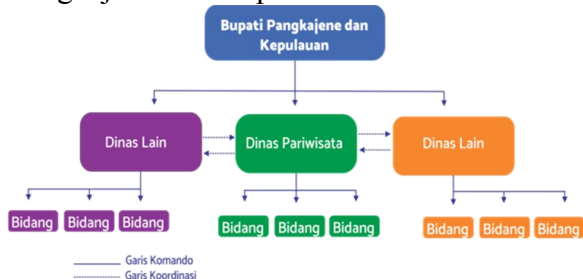
keputusan juga bergantung pada koordinator.

Berbeda dengan pola kerja sama equal collaborative yang mengedepankan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan dimana peran dari koordinator adalah sebagai mediator dan fasilitator untuk menampung aspirasi setiap anggota serta berfungsi sebagai pembagi peran masing-masing anggota, sehingga pengambilan keputusan adalah kesepakatan bersama dan juga menguntungkan bagi setiap anggota. Berikut adalah skema pola equal collaborative



Gambar 3
Pola equal Kolaboratif

Di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pola kerja sama yang saat ini dipakai adalah bentuk pola kerja sama struktural atau unequal collaborative, terlihat dari struktur organisasi yang ada di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.



Gambar 4
Struktur Organisasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Melihat skema di atas terlihat bahwa pola kerja sama yang diterapkan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah

berbentuk struktural dimana arus perintah bersifat direktif dari Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, sehingga saat ini pola tata kelola destinasi pariwisata di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan khususnya kawasan pulau Camba-Cambang dan sekitarnya bersifat *Top-Down* atau perintah dari atasan ke bawahan.

Kondisi Tingkat Kepentingan dan Pengaruh Stakeholder

Dalam menganalisis Stakeholder dapat dilakukan dengan cara pemetaan stakeholder berupa matriks kepentingan dan pengaruh. Penyusunan matriks dilakukan dengan cara pengisian skoring terhadap kepentingan dan pengaruh para responden (Stakeholder terkait) berdasarkan pertanyaan yang digunakan dalam mengukur tingkat kepentingan dan pengaruh serta didasarkan juga dari hasil wawancara dengan responden. Untuk skoring, dilakukan dengan cara pengukuran data berjenjang 5, nilai skor dari lima pertanyaan kepentingan dan pengaruh dikaitkan juga dengan pertanyaan dari wawancara yang nantinya akan diberi skor dan dijumlahkan lalu nilainya dipetakan dalam bentuk matriks. Teknik skoring pada penelitian ini berdasarkan pada konsep Rosalinda dimodifikasi oleh Abbas (2005), dimana dengan nilai ini hasilnya akan berupa matriks yang terdiri dari empat kuadran yang nantinya letak kuadran Stakeholder akan berdasarkan pada penilaian berikut ini

Tabel 2.

Tabel skoring terhadap kepentingan dan pengaruh pamangku kepentingan

Skor	Nilai	Kriteria	Ket
Kepentingan Stakeholder			
5	21-25	Sangat Tinggi	Sangat mendukung pengembangan pariwisata
4	16-20	Tinggi	Mendukung pengembangan pariwisata

Endah Trihayuningtyas, Wisnu Rahtomo dan Haryadi Darmawan : Rencana Tata Kelola Destinasi Pariwisata Kawasan Pulau Camba-Cambang dan Sekitarnya di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Skor	Nilai	Kriteria	Ket
3	11-15	Cukup Tinggi	Cukup mendukung pengembangan pariwisata
2	6-10	Kurang Tinggi	Kurang mendukung pengembangan pariwisata
1	0-5	Rendah	Tidak mendukung pengembangan pariwisata
Pengaruh Stakeholder			
5	21-25	Sangat Tinggi	Sangat mempengaruhi pengembangan pariwisata
4	16-20	Tinggi	Mempengaruhi pengembangan pariwisata
3	11-15	Cukup Tinggi	Cukup mempengaruhi pengembangan pariwisata
2	6-10	Kurang Tinggi	Kurang mempengaruhi pengembangan pariwisata
1	0-5	Rendah	Tidak mempengaruhi pengembangan pariwisata

Dengan nilai ini hasilnya akan berupa matriks yang terdiri dari 4 (empat kuadran) yang nantinya letak kuadran stakeholder akan berdasarkan pada penilaian ini. 4 kuadran dalam matriks diantaranya adalah subjects, key players, crowd, dan context setters.

Subjects memiliki kepentingan yang tinggi tetapi pengaruhnya rendah. Walaupun mendukung kegiatan, kapasitasnya terhadap dampak mungkin tidak ada. Key players merupakan Stakeholder yang aktif karena mempunyai kepentingan dan pengaruh yang tinggi terhadap pengembangan suatu proyek. Crowd merupakan Stakeholder yang memiliki sedikit kepentingan dan pengaruh terhadap hasil yang diinginkan dan hal ini

menjadi pertimbangan untuk mengikutsertakannya dalam pengambilan keputusan. Context setters memiliki pengaruh yang tinggi tapi sedikit kepentingan sehingga dapat menjadi risiko signifikan untuk dipantau. (Reed et al. 2009).

1. Identifikasi Stakeholder

Hasil penelitian mengidentifikasi Stakeholder yang terlibat dalam pengembangan tata kelola pariwisata di kawasan pulau Camba-cambang yaitu sebanyak 29 stakeholder. Stakeholder ini dikelompokkan kedalam 4 kelompok berbeda diantaranya 20 stakeholder dari SKPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 3 stakeholder dari pihak swasta, 1 stakeholder dari masyarakat, dan 5 stakeholder dari kelompok-kelompok lain.

Tabel 3
Stakeholder pengembangan tata kelola pariwisata Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Kelompok	Instansi
Pemerintah Daerah	1. Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
	2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	3. Dinas Perhubungan
	4. Dinas Kelautan dan Perikanan
	5. Dinas Kesehatan
	6. Dinas Tataruang, Pemukiman, dan Kebersihan
	7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	8. Dinas Kehutanan
	9. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	10. Dinas Pertambangan
	11. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah
	12. Satpol PP
	13. Polres
	14. Dinas Pembangunan Umum
	15. Dinas Koperasi dan Perdagangan
	16. Dinas Pendidikan
	17. Dinas Pemuda dan Olahraga
	18. Badan Lingkungan Hidup
	19. BAPPEDA
	20. Kepala Desa

Kelompok	Instansi
	21. Camat
Swasta	1. Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) 2. Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA)
Masyarakat	1. Tokoh masyarakat pulau cangke
Kelompok Lain	1. Kelompok nelayan 2. Kelompok pedagang 3. Komunitas pencinta alam 4. Komunitas fotografi 5. Komunitas jurnalis

2. Penilaian Terhadap Pengaruh dan Kepentingan Stakeholder

Penilaian yang diberikan kepada stakeholder diberikan berdasarkan hasil wawancara dan melihat dari tugas pokok, fungsi, program kerja, serta data-data primer lain yang kami dapatkan dari stakeholder (SKPD dan non-SKPD) agar peneliti dapat memberikan penilaian secara jelas dan berdasarkan data-data yang akurat.

Keterangan :

Kepentingan

P1 : Keterlibatan stakeholder dalam pengembangan pariwisata di kawasan pulau Camba-cambang

P2 : Pengembangan pariwisata di Kawasan pulau Camba-cambang merupakan program prioritas stakeholder.

P3 : Kewenangan stakeholder dalam pengembangan pariwisata di Kawasan pulau Camba-cambang

P4 : Manfaat pengembangan pariwisata di Kawasan pulau Camba-cambang bagi stakeholder

P5 : Keterkaitan stakeholder terhadap pengembangan pariwisata di Kawasan pulau Camba-cambang..

Pengaruh

P1 : Kemampuan stakeholder dalam memperjuangkan aspirasinya dalam pengembangan pariwisata di Kawasan pulau Camba-cambang.

P2 : Kemampuan stakeholder dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata di Kawasan pulau Camba-cambang.

P3 : Kapasitas SDM stakeholder yang aktif dalam pengembangan pariwisata Kawasan pulau Camba-cambang

P4 : Kontribusi fasilitas/sarana prasarana stakeholder yang diberikan dalam pengembangan pariwisata Kawasan pulau Camba-cambang.

P5 : Alokasi sumberdaya stakeholder dalam pengembangan pariwisata di Kawasan pulau Camba-cambang.

Tabel 5

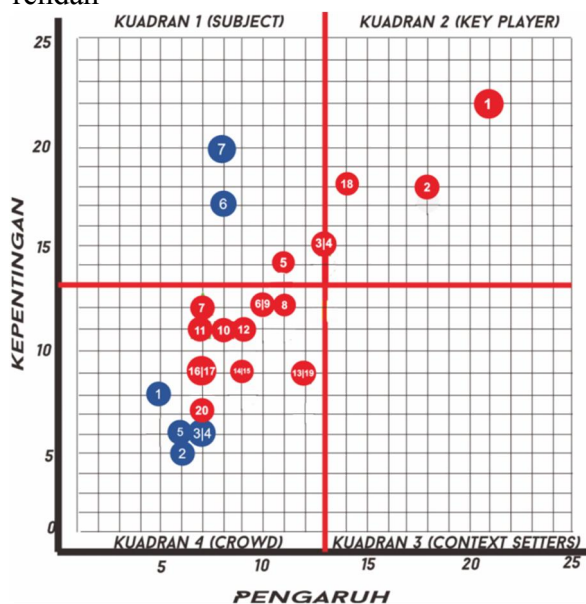
Tabel Hasil Nilai dari Kepentingan dan Pengaruh Stakeholder

Stakeholder	P	P	P	P	P	Jumlah
	1	2	3	4	5	
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	4	5	5	3	5	22
Dinas Kelautan dan Perikanan	4	4	3	4	3	18
Dinas Kebersihan	4	2	3	3	3	15
Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi	2	4	4	1	4	15
Badan Lingkungan Hidup (BLH)	3	3	3	1	4	14
Dinas Pemuda dan Olahraga	3	2	3	2	2	12
Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	3	2	3	1	3	12
Dinas Pertambangan Energi dan Sumber Daya	1	2	2	2	2	12
Dinas Pekerjaan Umum	4	2	3	2	1	12
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD)	1	2	2	2	4	11
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	3	2	2	2	2	11
Dinas Pendapatan Daerah	3	2	3	1	2	11
Dinas Tenaga Kerja	1	1	2	2	3	9
Satpol PP	1	2	2	1	3	9
Dinas Kehutanan dan Perkebunan	2	2	2	2	1	9
Dinas Pendidikan	1	2	2	1	3	9
Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKKD)	1	2	2	1	3	9
BAPPEDA	4	4	3	3	4	18
Polres	2	3	1	1	2	9
Dinas Kesehatan	1	1	2	1	2	7

Endah Trihayuningtyas, Wisnu Rahtomo dan Haryadi Darmawan : Rencana Tata Kelola Destinasi Pariwisata Kawasan Pulau Camba-Cambang dan Sekitarnya di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

PHRI	2	1	2	1	2	8
HPI	1	1	1	1	1	5
ASITA	1	1	1	1	2	6

Keterangan Nilai :5: Sangat tinggi; **4:** tinggi; **3:** cukup tinggi; **2:** kurang tinggi; **1:** rendah



Gambar 5

Gambar Matriks Kepentingan dan Pengaruh Stakeholder dalam Tata Kelola Pariwisata di Kawasan Pulau Camba-Cambang

KETERANGAN:

- = SKPD
- = Non SKPD
- 1 = DISBUDPAR
- 2 = DINAS KELAUTAN & PERIKANAN
- 3 = DINAS KEBERSIHAN
- 4 = DISHUBKOMINFO
- 5 = Badan Lingkungan Hidup
- 6 = DISPORA
- 7 = DISKOPERINDAG
- 8 = Dinas Pertambangan, Energi dan Sumberdaya
- 9 = Dinas Pekerjaan Umum
- 10 = Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
- 11 = Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 12 = Dinas Pendapatan Daerah
- 13 = DINSOSNAKER
- 14 = Satpol PP
- 15 = Dinas Kehutanan dan Perkebunan
- 16 = Dinas Pendidikan
- 17 = Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD)
- 18 = BAPPEDA
- 19 = Polres
- 20 = Dinas Kesehatan
- 1 = PHRI
- 2 = HPI
- 3 = ASITA
- 4 = Pers
- 5 = PALA
- 6 = Pedagang
- 7 = Transportasi Kapal

Dalam matriks ini stakeholder dibagi menjadi dua golongan, yaitu SKPD dan Non-SKPD. SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) adalah pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik (UU No. 32 tahun 2004), sedangkan Non-SKPD adalah kelompok-kelompok yang tidak terikat dengan pemerintahan namun memiliki keterkaitan dengan tatakelola pariwisata di kawasan pulau Camba-cambang.

Posisi kuadran 1 (Subject)

ditempati oleh kelompok penyedia jasa transportasi kapal dan kelompok pedagang yang merupakan golongan non-SKPD. Golongan SKPD yang berada pada posisi kuadran 1 (Subject) adalah BLH

Posisi kuadran 2 (Key Player)

ditempati oleh beberapa SKPD yaitu Disbudpar (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata), Dinas Kelautan dan Perikanan, BAPPEDA, Dinas Kebersihan, DISHUBKOMINFO (Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi) kelompok yang berada di kuadran 2 ialah kelompok Stakeholder yang memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh yang tinggi serta memiliki tingkat keterlibatan yang tinggi pula.

Posisi kuadran 4 (Crowd)

ditempati oleh golongan SKPD dan non SKPD sebagian besar ditempati oleh dinas-dinas dimana program kerja ataupun renja dinas – dinas tersebut yang dapat mendukung pengembangan pariwisata di Pulau Camba Cambang. Selain itu dinas – dinas tersebut turut serta dalam pembangunan pariwisata secara fisik, seperti Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertambangan energi dan Sumberdaya, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pendapatan Daerah, Dinas

Sosial dan Tenaga Kerja, SATPOL PP, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Pendidikan, Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD), Kepolisian Resor, dan Dinas Kesehatan Golongan Non – SKPD yang menempati posisi kuadran 4 (Crowd) adalah PHRI (Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia), HPI (Himpunan Pramuwisata Indonesia), ASITA (Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies) Kelompok Pers, dan PALA (Komunitas Pecinta Alam)

Tabel 6

Tabel peranan SKPD dengan keterkaitan pengembangan pariwisata Pulau Camba-Cambang dan sekitarnya

SKPD	Keterkaitan Pengembangan Pariwisata
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR)	▲
Dinas Kelautan dan Perikanan	▲
Dinas Kebersihan	▲
Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi (DISHUBKOMINFO)	▲
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	▲
Dinas Pemuda dan Olah raga	□
Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (DISKOPERINDAG)	▲
Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya	▲
Dinas Pekerjaan Umum (PU)	▲
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD)	▲
Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA)	□
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (DINSOSNAKER)	□
SATPOL PP	—
Dinas Kehutanan dan Perkebunan (DISHUTBUN)	□
Dinas Pendidikan	▲
Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD)	▲
Kepolisian Resor (POLRES)	▲
PHRI	▲
HPI	▲

SKPD	Keterkaitan Pengembangan Pariwisata
ASITA	▲
Komunitas Jurnalis (Pers)	□
Komunitas Pecinta Alam	□
Penyedia perahu penyeberangan	▲
Pedagang	▲

Keterangan:

▲ = Keterkaitan Kuat

□ = Keterkaitan Sedang

— = Keterkaitan Lemah

Mengenai keterkaitan antar SKPD dengan pengembangan pariwisata Pulau Camba-Cambang dan sekitarnya, dapat pula di lihat dari program rencana kerja masing-masing SKPD yang ada di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Berikut dapat dilihat masing-masing SKPD yang memiliki program kerja terkait dengan pengembangan pariwisata Pulau Camba-Cambang dan sekitarnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan yang didapatkan dalam Rencana Tata Kelola Destinasi Pariwisata Kawasan Pulau Camba-Cambang dan Sekitarnya Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah:

1. Tingkatan dari stakeholder yang ada di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah Stakeholder kunci adalah Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Stakeholder Primer adalah SKPD yang keterangannya berada di Tabel 2 Stakeholder Sekunder adalah pihak non-SKPD yang keterangannya berada di Tabel 2.
2. Koordinasi antar Stakeholder masih secara inequal collaborative terlihat dari struktur organisasi yang ada di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, bentuk pola ini ada di Gambar 6 pada Bab IV. Pada Pola ini keterlibatan pihak – pihak dalam pembangunan Pariwisata masih didominasi oleh pihak Pemerintahan (SKPD) dan belum

Endah Trihayuningtyas, Wisnu Rahtomo dan Haryadi Darmawan : Rencana Tata Kelola Destinasi Pariwisata Kawasan Pulau Camba-Cambang dan Sekitarnya di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

melibatkan pihak non – SKPD. Dalam kenyataannya di Pemerintahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, sekalipun dalam pola Inequal Collaborative yang koordinasinya didominasi oleh pihak SKPD, namun SKPD lain di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan selain Dinas Pariwisata pun tidak terlibat dan tidak berpengaruh dalam sektor pariwisata padahal dalam rencana kerja terdapat program – program yang terkait dengan kegiatan di sektor pariwisata, dan pihak non –SKPD pun tidak terlibat secara resmi dalam kegiatan sektor pariwisata.

3. Kondisi tingkat kepentingan dan pengaruh stakeholder di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berdasarkan matriks Gambar 7 menghasilkan Posisi kuadran 1 (Subject) ditempati oleh kelompok penyedia jasa transportasi kapal dan kelompok pedagang yang merupakan golongan non-SKPD. Golongan SKPD yang berada pada posisi kuadran 1 (Subject) adalah BLH. Posisi kuadran 2 (Key Player) ditempati oleh beberapa SKPD yaitu Disbudpar (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata), Dinas Kelautan dan Perikanan, BAPPEDA, Dinas Kebersihan, DISHUBKOMINFO (Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi). Posisi kuadran 4 (Crowd) ditempati oleh golongan SKPD dan non SKPD sebagian besar ditempati oleh dinas-dinas dimana program kerja ataupun renja dinas – dinas tersebut yang dapat mendukung pengembangan pariwisata di Pulau

4. Camba Cambang. Selain itu dinas – dinas tersebut turut serta dalam pembangunan pariwisata secara fisik, seperti Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertambangan energi dan Sumberdaya, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, SATPOL PP,

Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Pendidikan , Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD), Kepolisian Resor, dan Dinas Kesehatan. Golongan Non – SKPD yang menempati posisi kuadran 4 (Crowd) adalah PHRI (Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia), HPI (Himpunan Pramuwisata Indonesia), ASITA (Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies) Kelompok Pers, dan PALA (Komunitas Pecinta Alam).

SARAN

Rekomendasi dalam Rencana Tata Kelola Destinasi Pariwisata Kawasan Pulau Camba-Cambang dan Sekitarnya Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berdasarkan kesimpulan 1, 2, dan 3 adalah Forum Tata Kelola Destinasi. Didalam forum ini di harapkan menjadi penggerak dalam seluruh kegiatan di sektor pariwisata di Kawasan Pulau Camba-Cambang. Forum ini sebagai wadah yang mempunyai peran penting bersama berbagai stakeholder yang berkolaborasi untuk pembangunan kepariwisataan.

Mengacu pada Pedoman Umum Pembentukan Forum Tata Kelola Pariwisata (FTKP), Kemenpar 2014 Fungsi Forum Tata Kelola Pariwisata: 1. Sebagai media dalam membangun dan mewujudkan komitmen bersama dari bersama masing-masing stakeholder untuk pengelolaan kepariwisataan Internal Destination Development dan External Destination Marketing (IDD dan EDM) 2. Sebagai media komunikasi yang sistematis dan berkelanjutan 3. Sebagai wadah pembagian peran agar fungsi masing-masing stakeholder menjadi jelas 4. Sebagai media pemberdayaan stakeholder. Tujuan pembentukan Forum Tata Kelola Pariwisata di Kawasan Pulau Camba-Cambang dan Sekitarnya: 1. Agar stakeholder mengetahui peran dan fungsi masing-masing dalam sektor pariwisata 2. Sebagai wadah untuk menyelesaikan

permasalahan yang terjadi terkait sektor pariwisata. Sasaran pembentukan Forum Tata Kelola Pariwisata di Kawasan Pulau Camba-Cambang dan Sekitarnya ditujukan kepada semua stakeholder yang terkait sektor pariwisata di Kawasan Pulau Camba-Cambang dan sekitarnya.

Kegiatan pembentukan Forum Tata Kelola Pariwisata ini akan membentuk pihak yang akan bertanggung jawab untuk seluruh kegiatan pariwisata di Kawasan Pulau Camba-Cambang dan sekitarnya, sehingga pada nantinya di harapkan semua kegiatan pariwisata yang akan terjadi dapat di tampung dalam satu forum ini. Kawasan Pulau Camba-Cambang ini direncanakan sebagai pusat distribusi wisata bahari di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

1. Tahapan Pembentukan Forum Tata Kelola Pariwisata

Mengacu pada Pedoman Umum Pembentukan Forum Tata Kelola Pariwisata (FTKP), Kemenpar 2014 pembentukan Forum Tata Kelola Pariwisata terdiri dari empat rangkaian kegiatan:

- a. Pembentukan Kelompok Kerja Lokal Pariwisata
- b. Penggalangan Komitmen Stakeholder
- c. Pengembangan Kerjasama Kelompok Kerja Lokal Pariwisata dan Stakeholder Lain menuju Pembentukan Forum Tata Kelola Destinasi Pariwisata.

Karakter Forum Tata Kelola Pariwisata adalah:

- 1) Kesetaraan: seluruh anggota forum berkedudukan setara
- 2) Keterwakilan yang otonom: seluruh anggota forum mewakili kepentingan organisasi induk.
- 3) Terlembagakan: forum harus dilembagakan sehingga ada pengikat bagi pihak-pihak yang terlibat.
- d. Pembentukan Komisi dan Pokja
Komisi dan Kelompok Kerja (Pokja) dibentuk untuk melaksanakan berbagai program pembangunan dan

operasionalisasi sistem pengelolaan pariwisata terpadu di destinasi.

Anggota Komisi dan Pokja merupakan sebagian anggota Forum Tata Kelola Pariwisata yang memiliki kompetensi untuk mendorong dan melaksanakan program-program pembangunan kepariwisataan di destinasi terkait.

2. Metode dan Alat Yang digunakan dalam Forum Tata Kelola Pariwisata

a. Metode

Metode yang dapat dilakukan pada Forum Tata Kelola Pariwisata adalah:

- 1) Stakeholders Meeting
- 2) Workshop
- 3) Focus Group Discussion (FGD)

b. Alat

Alat yang dapat digunakan untuk Forum Tata Kelola Pariwisata adalah ;

- 1) Matriks Sikronisasi fungsi dan peran SKPD yang di temukan di SKPD
- 2) Identifikasi Kebutuhan Pengembangan
3. Mekanisme Pengawasan Forum Tata Kelola Pariwisata
 - a. Penyusunan indikator, tolok ukur, serta target pemantauan dan evaluasi sesuai dengan karakteristik dan rincian program/kegiatan Forum Tata Kelola Pariwisata yang akan dilakukan.
 - b. Pemantauan terhadap kemajuan setiap tahap pelaksanaan program/kegiatan Forum Tata Kelola Pariwisata menurut tahun berjalannya.
 - c. Penilaian terhadap kesesuaian target dengan realisasi pelaksanaan program/kegiatan Forum Tata Kelola Pariwisata menurut tahun berjalannya.
 - d. Pelaporan hasil penilaian terhadap pencapaian target pelaksanaan program/kegiatan Forum Tata Kelola Pariwisata menurut tahun berjalannya.
 - e. Pelaksanaan evaluasi keunggulan dan kelemahan pelaksanaan program/kegiatan Forum Tata Kelola Pariwisata menurut tahun berjalannya.

Endah Trihayuningtyas, Wisnu Rahtomo dan Haryadi Darmawan : Rencana Tata Kelola Destinasi Pariwisata Kawasan Pulau Camba-Cambang dan Sekitarnya di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

- f. Penyelenggaraan sosialisasi hasil pemantauan dan evaluasi program/kegiatan Forum Tata Kelola Pariwisata menurut tahun berjalannya.
g. Peran masing-masing pihak

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Benjamin. 2014. Destination Management Organization (DMO). Jakarta. Jurnal Kepariwisata Indonesia Vol. 9 No. 2 Juni 2014
- Agranoff, Robert and Michael Mc. Guire. 2003. Collaborative Public Management : new strategies for Local Government. Washington DC:Georgetown University Press.
- Buckles, D. (1999). Stakeholder Analysis and Conflict Management.
- Emzir. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data. Rajawali Pers. Surabaya
- Huberman. 1984. Qualitative Data Analysis. Sage Publications Inc. California.
- Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 2010 Pedoman Pengembangan Destination Management Organization. Jakarta
- Kementrian Pariwisata. 2014 Pedoman Umum Forum Tata Kelola Pariwisata. Jakarta
- Middleton, Victor dan Jackie R. Clarke. 2001. Marketing in Travel and Tourism. Third Edition. Butterworth Heinemann. London
- Morisson, 2012. Destination management and Destination marketing : The Platform for excellent in Tourism Destination.
- Morisson, Alastair. (2012). Destination Management and Destination Marketing : The Platform for the excellence in Tourism Destination. London.
- Nazir. 1988. Buku Contoh Metode Penelitian. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Prabowo, H. 1996. Metode – Metode Penelitian Masyarakat. Gramedia. Jakarta.
- Reed, M.S., Graves, A., Dandy, N., Posthumus, H., Hubacek, K., Morris, J., Prell, C., Quinn, C, H., and Lindsay, C, S. (2009) Who's in and Why? Typology of Stakeholder Analysis for Nature Resource Management, Journal of Environment Management, 90 :1933 – 1949. Doi: 10.1016/j.jenvman.2009.01.001
- Republik Indonesia. 2009. Undang – Undang No. 10 Tahun 2009. Sekretariat Negara. Jakarta.
- RIPPDA, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2014-2023.
- RPJMD, Provinsi Sulawesi Selatan
- RTRWP, Provinsi Sulawesi Selatan
- UNWTO. (2012). Destination Management Organization
- Wirakusuma, Reiza Miftah. 2017. PROGRAM ACTIVITY PLANNING BASED ON TRADITIONAL GAMES, HISTORY AND WATER BASED RECREATION IN CANGKUAN LAKE - PERENCANAAN AKTIFITAS WISATA BERBASIS SEJARAH, PERMAINAN TRADISIONAL DAN REKREASI AIR DI SITU CANGKUAN. Bandung. Jurnal Manajemen Resort dan Leisure Vol. 14, No.2 Oktober 2017. DOI: <http://dx.doi.org/10.17509/jurel.v14i2.10455>